

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Panggerang Syafa'at Anugrah, 2018, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Antonius Cahyadi dan E Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana., Jakarta

Djulaeka Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian HUKUM, Scorpindo Media Pustaka, Surabaya.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Yogyakarta.

Joneadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian HUKUM Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok.

Peter Mahkum Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta.

Umar Said Sugiarto, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Yos Johan, 2009, "Pengujian Keputusan Disertasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara", Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas, Diponegoro, Semarang

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi:

A. Salman Maggalatung, "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam pertimbangan Putusan Hakim", Jurnal Cita Fakultas Syariah dan Hukum UIN Vol. II No. 2 desember 2014.

Andi Suhardiyanto, Puji Lestari, Pelestarian Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008, Forum Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Unnes, Vol. 36, No. 3 Desember 2008,

- Anggrainy Atletika Rottie, Kewenangan Bupati dalam Proses Pemberhentian Kepala Desa (studi kasus di Desa Talawaan Bantik), *Jurnal Lex Administratum*, vol. II, Nomor 2, April-Juni 2014.
- Anwar Sadat, "Penegakan Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (studi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)" Skripsi sarjana Hukum, Fakultas syariah, universitas islam negeri sultan thaha saifuddin, Jambi, 2018
- Depri Liber Senata, Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari metode meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas HUKUM, Universitas Lampung, Volume 8 nomor 1, Januari-Maret 2014.
- Dhika Dadi, "Prosedur Pelayanan Kelurahan Pelanggan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surakarta", Skripsi, Diplomat III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Diska Harsandini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan sanksi dalam Perkara kekerasan terhadap barang (studi putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/PID/2014)", *Jurnal Verstek*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Volume 5 Nomor 2, 2014
- Edi Susanto, Proses pengangkatan dan pemberhentian pangkat Desa berdasarkan pemendagri Nomor 67 Tahun 2017 (studi di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.
- Intan Rafatul Hakim, "Pertimbangan Hakim terhadap penetapan Dispensasi kawin di pengadilan agama Pecitan pada tahun 2016", Skripsi, Fakultas syariah institute Agama Islam Negeri Ponogoro, 2017.
- Novi Rismayanti, "Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa", Skripsi, Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018.
- Qhilby, "Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan", Skripsi, Sarjana

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Medan, 2018.

Seriadings Claudia, "Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspos di Kantor Imigrasi kelas 1 Manado", Diplomat III, Jurusan Parawisata, Politeknik Negeri Manado, 2015.

Shinta Dwi Prana Dewi, dkk, "Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas dalam Uapaya meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus, Jurnal, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia", Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia , Vol. I No I Juni 2014.

Sugih Arto Pujangkoro, "Analisis Jabatan (Job Analysis), Academia.edu, Fakultas Teknik, Universitas Sumatra Utara, e-USU Depository 2004

Viki Rathomi dkk, "Kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Pejabat Pemerintahan

Internet:

<https://kbbi.web.id/prosedur>

<https://kbbi.web.id/sanksi>

LAMPIRAN



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 880/329 /BKPSDM/2020

TENTANG

PENUCASAN/PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 400 Tahun 2020 tanggal 04 Mei 2020;
 - b. bahwa dalam rangka Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka dipandang perlu segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kinerja, kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 880/329 /BKPSDM/2020

TENTANG

PENUCASAN/PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 400 Tahun 2020 tanggal 04 Mei 2020;
- b. bahwa dalam rangka Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka dipandang perlu segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kinerja, kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;